

MAKNA BANTUAN DAN PROSES PEMBELAJARAN INFORMAL: RESILIENSI KELUARGA PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

The Meaning of Assistance and Informal Learning Processes: Resilience of *Program Keluarga Harapan* (PKH) Recipient Families

Ahmad Fauzi, Nining Purwaningsih, M. Syadeli Hanafi

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

fauzipls@untirta.ac.id; nining.purwaningsih@untirta.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 28, 2025	Nov 20, 2025	Dec 2, 2025	Dec 7, 2025

Abstract

Although the *Program Keluarga Harapan* (PKH) is designed to enhance the welfare and self-reliance of vulnerable families through financial assistance combined with educational activities such as *P2K2/P3K*, its implementation effectiveness does not always align with the policy design. This study aims to explore the experiences of PKH beneficiaries in the subdistricts of Cadasari and Karangtanjung and the City of Cilegon to understand how the assistance is interpreted, implemented, and perceived in relation to behavioral change and the development of beneficiaries' capacity for self-reliance. Adopting a qualitative approach with an interpretative phenomenological method, the study draws on in-depth interviews, program observations, and document analysis. The findings reveal four main themes: assistance is more often perceived as a routine entitlement than as a transformative instrument; low financial and digital literacy constrains the optimal utilization of

benefits; *P2K2/P3K* activities tend to function as administrative procedures rather than genuine learning spaces; and local resilience develops through informal coping strategies grounded in social capital. These findings indicate that PKH beneficiaries are not in a passive position but actively develop adaptive strategies, although these strategies are not yet fully oriented toward long-term economic self-reliance. The study concludes that PKH effectiveness requires a shift in implementation from mere benefit distribution to an empowerment-oriented model that strengthens financial and digital capacities, enhances the quality of adult-learning-based mentoring, and integrates local social capital into the program's formal mechanisms. This study contributes to the development of an adaptive social protection approach in Indonesia and offers implementable recommendations for strengthening literacy and mentoring that are sensitive to local contexts.

Keywords: *Program Keluarga Harapan* (PKH); Informal Learning; Empowerment; Family Resilience; Adaptive Social Protection

Abstrak: Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga rentan melalui bantuan finansial yang dipadukan dengan kegiatan edukasi seperti *P2K2/P3K*, efektivitas implementasinya tidak selalu sejalan dengan desain kebijakan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman penerima PKH di Kecamatan Cadasari, Karangtanjung, dan Kota Cilegon untuk memahami bagaimana bantuan dimaknai, dijalankan, dan berdampak terhadap perubahan perilaku serta kapasitas kemandirian penerima. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi interpretatif melalui wawancara mendalam, observasi program, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkap empat tema utama, yaitu bantuan yang lebih dimaknai sebagai rutinitas daripada instrumen transformasi; rendahnya literasi finansial dan digital yang menghambat optimalisasi manfaat bantuan; kegiatan *P2K2/P3K* yang cenderung berfungsi sebagai proses administratif dibandingkan ruang pembelajaran; serta resiliensi lokal yang berkembang melalui strategi bertahan informal berbasis modal sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa penerima PKH tidak berada pada posisi pasif, melainkan mengembangkan strategi adaptif, meskipun belum sepenuhnya berorientasi pada kemandirian ekonomi jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PKH menuntut reorientasi implementasi dari sekadar penyaluran bantuan menuju model pemberdayaan yang memperkuat kapasitas finansial-digital, meningkatkan kualitas pendampingan berbasis pembelajaran orang dewasa, dan mengintegrasikan modal sosial lokal ke dalam mekanisme formal program. Studi ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan *adaptive social protection* di Indonesia serta menawarkan rekomendasi implementatif untuk penguatan literasi dan pendampingan yang peka terhadap konteks lokal.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan; Pembelajaran Informal; Pemberdayaan; Resiliensi Keluarga; *Adaptive Social Protection*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia merupakan program transfer bersyarat yang bertujuan meningkatkan akses layanan dasar (kesehatan, pendidikan) dan memutus mata rantai kemiskinan. Evaluasi eksperimen panjang menunjukkan dampak positif

pada indikator tertentu (mis. pemanfaatan layanan kesehatan, sekolah) namun juga menunjukkan perlunya intervensi pelengkap untuk memperkuat outcomes jangka panjang (Hanna, n.d. 2018).

Di tingkat lokal, berdasarkan hasil observasi pada tiga unit PKH di wilayah Tiga lokus penelitian ditemukan pola konsisten: rendahnya literasi finansial dan digital penerima, terputusnya kegiatan pembinaan ketika pencairan tertunda, serta kelaziman pemaknaan PKH sebagai sumber bantuan konsumtif daripada instrumen perubahan perilaku. Temuan ini tercatat dalam laporan UPPKH Kecamatan Cadasari, hasil observasi Tim PKH Karangtanjung (Kampung Canggoang), dan laporan PKH Kota Cilegon. Persoalan praktis ini relevan secara kebijakan: kebijakan *social protection modern* menuntut integrasi adaptif antara program bantuan dan manajemen risiko bencana/krisis (*adaptive social protection*) serta penguatan digitalisasi dan literasi penerima agar transfer benar-benar efektif saat guncangan (Gasior et al., 2024).

Situasi keluarga penerima PKH di Kabupaten/Kota Serang juga mencerminkan kondisi kerentanan struktural yang lebih luas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menunjukkan bahwa pada tahun 2024 masih terdapat sekitar 873.490 penduduk miskin, dengan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon termasuk wilayah penyumbang terbesar kategori *miskin ekstrem* terutama pada rumah tangga dengan anak sekolah dan lansia tanggungan. Tren kemiskinan ekstrem di Banten baru menurun tipis dari 4,35% pada 2021 menjadi 3,90% pada 2024, dan laporan evaluasi Bappenas menyebut bahwa penurunan tersebut berjalan lebih lambat dibandingkan target nasional (<1% tahun 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa program bantuan sosial seperti PKH masih menjadi intervensi strategis dan berperan penting dalam menopang kebutuhan dasar keluarga rentan—namun sekaligus menunjukkan bahwa bantuan saja belum cukup untuk mendorong mobilitas sosial ke arah kemandirian (*Profil-Kemiskinan-Di-Provinsi-Banten-Maret-2024*, n.d.)

Lebih jauh, pandemi COVID-19 memberi dampak signifikan terhadap pola keberlangsungan hidup keluarga miskin dan menengah bawah, termasuk penerima PKH. Studi World Bank mencatat bahwa 87% rumah tangga penerima CCT di Indonesia menggunakan bantuan utama untuk kebutuhan konsumtif dan survival, bukan penguatan aset atau tabungan (Gentilini, 2022). Dampak pandemi juga mengakselerasi digitalisasi bantuan sosial melalui skema *cashless transfer*, tetapi implementasinya menghadapi hambatan karena rendahnya literasi digital masyarakat rentan. Temuan ini konsisten dengan hasil

observasi pada tiga lokasi penelitian di Serang, yaitu: ketidaktahuan cara mengakses saldo, kebingungan penggunaan aplikasi bank, serta ketergantungan pada pendamping dalam transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem kesejahteraan sosial memerlukan fondasi literasi digital yang kuat, terutama bagi keluarga penerima bantuan sosial agar tidak justru menimbulkan *digital exclusion*.

Di sisi lain, berbagai penelitian dan evaluasi global terhadap program *Conditional Cash Transfers* (CCT) menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang program sangat bergantung pada komponen edukasi dan pembinaan yang menyertai bantuan finansial. Studi meta-analysis oleh (Bastagli et al., n.d.) dan penelitian terbaru dari Latin America & Southeast Asia (2020 - 2024) menemukan bahwa CCT akan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan hanya ketika disertai pendidikan literasi finansial, pelatihan pengasuhan, serta program perubahan perilaku. Tanpa komponen itu, manfaat program cenderung berhenti pada peningkatan akses layanan dasar bukan peningkatan kapasitas kemandirian rumah tangga. Kondisi ini sangat relevan dengan temuan lapangan di PKH Kabupaten/Kota Serang, di mana pelaksanaan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2/P3K) belum konsisten dan belum berjalan sebagai ruang pembelajaran efektif. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memahami pengalaman keluarga secara mendalam, serta mengidentifikasi strategi yang dapat memperkuat peran PKH sebagai *platform pembelajaran sosial* menuju kemandirian, bukan sekadar mekanisme transfer bantuan rutin (Sulastri et al., n.d.).

Walaupun Program Keluarga Harapan (PKH) telah banyak diteliti pada aspek efektivitas, penyaluran bantuan, dan dampaknya terhadap indikator kesehatan serta pendidikan, sebagian besar penelitian di Indonesia masih berfokus pada pendekatan kuantitatif dan evaluasi administratif. Kajian yang menggali pengalaman subjektif penerima manfaat terutama bagaimana mereka memaknai bantuan, membangun strategi bertahan hidup, dan belajar melalui proses informal dalam konteks pendampingan masih sangat terbatas. Selain itu, perubahan kebijakan pasca-pandemi mengenai digitalisasi bantuan sosial dan pergeseran menuju *adaptive social protection* belum dikaji secara mendalam dari sudut pandang penerima yang memiliki keterbatasan literasi digital dan finansial.

Temuan awal dari tiga lokasi PKH di Serang (Cadasari, Karangtanjung, dan Cilegon) menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara desain program dan pengalaman nyata penerima, seperti ketidakkonsistenan pelaksanaan P2K2, rendahnya pemahaman manfaat

program, serta munculnya pola ketergantungan dibanding kemandirian. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan atau kepatuhan persyaratan, tetapi juga oleh bagaimana pembelajaran informal, pola komunikasi, dan praktik sosial terbentuk dalam relasi penerima–pendamping–sistem digital.

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada pendekatan fenomenologis yang menempatkan suara dan pengalaman penerima PKH sebagai pusat analisis, untuk memahami bagaimana makna bantuan dibentuk, dimaknai, serta dioperasikan dalam proses adaptasi sosial dan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi baru dalam pengembangan model intervensi PKH yang lebih sensitif terhadap konteks lokal, berbasis literasi finansial-digital, dan sejalan dengan arah kebijakan perlindungan sosial adaptif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan untuk menggali secara mendalam makna dan pemahaman orang tua terhadap peran mereka dalam mendidik anak usia dini. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami pengalaman subjektif, persepsi, dan nilai-nilai yang dimiliki individu dalam konteks sosial tertentu. Menurut (Creswell, J. W., 2014) penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan. Lebih khusus lagi, penelitian ini menggunakan pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) untuk memaknai dan menginterpretasi suatu fenomena berdasarkan pengalaman menerima bantuan PKH dan bagaimana hal itu membentuk strategi hidup (Eatough & Smith, n.d.).

Lokasi penelitian pada tiga lokus, yaitu: Kecamatan Cadasari (UPPKH), Kampung Cangoang (Karangtanjung), dan Kota Cilegon yang dipilih *purposively* karena ada laporan lapangan yang menggambarkan problematika pendampingan dan literasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur; (2) Observasi partisipatif ; dan (3) analisis dokumen lokal: notulen pertemuan, modul yang digunakan pendamping. Teknik ini sejalan dengan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Moleong, L. J dalam (Pahleviannur et al., n.d.) yang menyarankan penggunaan triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas data.

Analisis data dilakukan mengikuti prosedur IPA dan thematic analysis (Braun & Clarke style): *familiarization* → *open coding* → pengelompokan kode menjadi tema →

interpretasi fenomenologis → triangulasi (wawancara-observasi-dokumen). Keabsahan dijaga melalui member checking, dan triangulasi sumber (Braun & Clarke, 2006).

HASIL

Hasil disajikan sebagai tema utama yang dihasilkan dari analisis data. Di setiap tema saya cantumkan kaitan dengan bukti lapangan (laporan mahasiswa) untuk memudahkan Anda menyambung kutipan lapangan. Analisis data menghasilkan empat tema besar yang menggambarkan pengalaman penerima manfaat PKH dalam memaknai bantuan, menjalani proses pendampingan, dan mengembangkan strategi bertahan di tengah dinamika ekonomi keluarga. Masing-masing tema dibentuk dari pola pengalaman berulang yang ditemukan melalui wawancara mendalam, observasi P2K2/P3K, serta penelaahan dokumen lapangan.

Tema 1 — *Bantuan Dimaknai sebagai Rutinitas, Bukan Transformasi*

Banyak keluarga memaknai PKH sebagai bantuan rutin untuk kebutuhan sehari-hari; mereka memahami syarat program tetapi melihatnya lebih sebagai sumber konsumsi jangka pendek ketimbang modal produktif. Dokumen observasi menyatakan fenomena serupa: penggunaan bantuan sebagian besar untuk kebutuhan konsumsif dan biaya sekolah rutin; P3K/P2K2 hanya aktif terkait pencairan.

Pada seluruh lokasi penelitian, sebagian besar informan memaknai PKH sebagai bantuan yang datang secara berkala, bukan sebagai instrumen pembangunan kapasitas atau perubahan perilaku keluarga. Narasi umum yang muncul adalah bahwa PKH dianggap sebagai “hak” karena kondisi ekonomi, bukan sebagai program bersyarat yang memiliki tahapan pembelajaran. Beberapa penerima menyatakan bahwa selama mereka masih “miskin dan memiliki anak sekolah”, maka bantuan akan terus diberikan. Pemahaman seperti ini berkontribusi pada pola ketergantungan sosial (*benefit dependency*) yang mengaburkan tujuan utama program, yaitu peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan indikator kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan anak. Selain itu, tidak banyak informan yang dapat menjelaskan alasan mengapa mereka menerima bantuan atau bagaimana proses penilaian kelayakan dilakukan. Ketidakjelasan konsep program juga berdampak pada minimnya orientasi menuju kemandirian ekonomi meski telah menerima bantuan selama bertahun-tahun. Temuan ini menunjukkan adanya jurang antara desain program PKH sebagai skema *Conditional Cash Transfer* dan cara penerima manfaat memaknainya dalam praktik sehari-hari.

Tema 2 — Rendahnya Literasi Finansial dan Digital menjadi Hambatan Kunci

Sejumlah keluarga tidak terbiasa dengan perencanaan anggaran, menabung, atau penggunaan layanan perbankan digital; ini menjadi hambatan besar ketika penyaluran non-tunai diterapkan. Laporan UPPKH Cadasari merekomendasikan pelatihan literasi keuangan dan literasi digital. Mayoritas keluarga penerima manfaat menggunakan dana bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan, transportasi sekolah, pulsa anak sekolah daring (masa pandemi), dan biaya kesehatan. Namun ketika ditanyakan mengenai praktik pengelolaan keuangan, sebagian besar menyatakan tidak memiliki pola anggaran, catatan pengeluaran, atau rencana tabungan.

Rendahnya literasi finansial menimbulkan konsekuensi lanjutan: tidak munculnya kemampuan mengonversi bantuan menjadi modal produktif seperti usaha rumahan, tabungan, atau pengelolaan aset. Temuan ini konsisten pada tiga lokasi dan selaras dengan temuan studi-studi nasional dan global terkait perilaku finansial dalam skema bantuan tunai.

Rendahnya literasi digital juga memperkuat hambatan ini. Proses *cashless transfer* yang mengharuskan penggunaan kartu ATM atau aplikasi mobile banking belum sepenuhnya dipahami penerima. Banyak informan mengaku hanya “menunggu instruksi pendamping” ketika pengambilan dana atau aktivasi fitur digital. Hambatan ini menempatkan penerima manfaat dalam posisi bergantung pada pendamping PKH, bukan sistem atau kemampuan mereka sendiri, sehingga pendamping menjadi perantara akses, bukan fasilitator kemandirian.

Tema 3 — P2K2/P3K Menjadi Ajang Administrasi, Bukan Proses Pembelajaran

Pertemuan P2K2/P3K adalah sarana kunci untuk pendidikan informal; namun di beberapa lokasi kegiatannya terhenti saat pencairan tertunda atau pendamping kehabisan kapasitas (beban kerja, sumber daya). Hal ini direkam dalam laporan observasi Kampung Cangoang dan Cadasari. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2/P3K), yang semestinya berfungsi sebagai ruang pembelajaran sosial, motivasi, dan penguatan kapasitas keluarga, belum berjalan optimal dan konsisten di tiga lokasi penelitian.

Beberapa pola yang muncul antara lain: (1) pertemuan lebih ramai saat pencairan mendekat; (2) materi pendampingan seringkali hanya disampaikan dalam bentuk ceramah satu arah; (3) tidak ada modul terstruktur yang memfasilitasi pembelajaran praktis seperti simulasi anggaran, manajemen keuangan rumah tangga, atau literasi kesehatan; dan (4) pendamping menyatakan beban administratif cukup tinggi sehingga penyampaian modul menjadi kurang intensif atau tidak prioritas.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktur program PKH menyediakan ruang pembelajaran, secara implementatif ruang ini belum berkembang menjadi lingkungan belajar sosial (*learning ecosystem*) bagi penerima manfaat. Dengan kata lain, fungsi edukatif program belum berperan setara dengan fungsi finansialnya.

Tema 4 — *Resiliensi Lokal Terbentuk melalui Strategi Bertahan Informal*

Meskipun terdapat ketergantungan terhadap bantuan, penelitian ini juga menemukan bahwa keluarga penerima manfaat memiliki strategi resiliensi berbasis komunitas. Strategi ini meliputi: (1) meminjam uang atau barang kebutuhan pokok dari tetangga; (2) membentuk pola konsumsi hemat (mengurangi lauk, membeli bahan pokok lebih murah); (3) melakukan pekerjaan informal tambahan (jualan kecil-kecilan, buruh lepas, ojek); dan (4) mengoptimalkan jaringan sosial seperti bantuan saudara dan arisan kecil.

Beberapa keluarga menunjukkan tanda-tanda peningkatan kapasitas adaptif meskipun belum dalam kategori mandiri. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa resiliensi keluarga penerima manfaat bukan tidak ada, tetapi bersifat spontan, tidak terencana, dan tidak terintegrasi dengan tujuan PKH. Temuan ini membuka peluang bahwa intervensi berbasis literasi finansial dan digital yang relevan dengan konteks sosial budaya lokal—dapat mempercepat transformasi strategi bertahan informal menjadi strategi peningkatan ekonomi yang sistematis.

Tabel 1. Ringkasan Pola Temuan

<i>Tema</i>	<i>Pola Umum</i>	<i>Implikasi</i>
<i>Bantuan sebagai rutinitas</i>	PKH dipahami sebagai hak, bukan instrumen pemberdayaan	Memunculkan pola ketergantungan
<i>Literasi finansial dan digital rendah</i>	Tidak ada perencanaan keuangan/tabungan, kesulitan akses digital banking	Pemanfaatan bantuan tidak optimal
<i>P2K2 belum optimal</i>	Bersifat informatif-administratif, bukan partisipatif-edukatif	Potensi edukasi dalam program belum tercapai
<i>Resiliensi berbasis komunitas</i>	Strategi bertahan informal dan spontan	Ada modal sosial yang dapat dioptimalkan

PEMBAHASAN

Tema 1 — *Bantuan Dimaknai sebagai Rutinitas, Bukan Transformasi*

Berdasarkan temuan, penerima PKH di Cadasari, Karangtanjung, dan Cilegon memaknai bantuan sebagai aliran rutin yang memenuhi kebutuhan sehari-hari (bukan instrumen pembangunan kapasitas) konsisten dengan kritik luas terhadap program transfer tunai yang hanya memenuhi konsumsi jangka pendek tanpa mengubah struktur kapasitas rumah tangga. Bukti meta-analitik dan review internasional menunjukkan bahwa CCT/PKH cenderung meningkatkan pengeluaran konsumsi dan akses layanan dasar, tetapi efek transformasional (investasi produktif, mobilitas sosial jangka panjang) bersifat heterogen dan bergantung pada strategi pelengkap seperti pendidikan dan akses pasar (Bastagli et al., n.d.).

Hasil penelitian mengungkap empat tema utama yang menggambarkan pola pemaknaan, perilaku, dan dinamika pendampingan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di tiga lokus penelitian: (1) bantuan dimaknai sebagai rutinitas, bukan transformasi; (2) rendahnya literasi finansial dan digital menjadi hambatan kunci; (3) P2K2/P3K lebih banyak berfungsi sebagai mekanisme administratif daripada proses pembelajaran; dan (4) resiliensi lokal terbentuk melalui strategi bertahan informal. Keempat tema ini memperlihatkan ketegangan antara desain PKH sebagai program *Conditional Cash Transfer* (CCT) dan realitas implementasi yang belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan keluarga rentan. Pada bagian ini, temuan dianalisis secara kritis dengan mengaitkannya pada teori, hasil penelitian terdahulu, dan kebijakan perlindungan sosial terbaru.

Pemaknaan bantuan PKH sebagai rutinitas konsumtif menunjukkan bahwa tujuan program belum sepenuhnya dipahami penerima manfaat. Kondisi ini menegaskan argumen Amartya Sen (Sen, 2001) dalam teori *capability approach* bahwa transfer finansial tidak otomatis menciptakan perubahan kapasitas apabila tidak dibarengi proses pendidikan, pendampingan, dan interaksi bermakna yang mengubah persepsi dan tindakan. Studi evaluatif berskala nasional oleh (Hanna, n.d.) menunjukkan bahwa PKH efektif meningkatkan indikator pendidikan dan kesehatan, namun efek empowerment dan kemandirian ekonomi masih terbatas. Hal serupa ditemukan di negara lain penerima CCT di mana perubahan signifikan baru muncul ketika program dilengkapi intervensi pembelajaran dan pelatihan (Bastagli et al., n.d.).

Berdasar konteks penelitian ini, pola pemaknaan PKH sebagai "hak rutin" didorong oleh relasi administratif *top-down*, minimnya komunikasi tujuan program, dan tidak adanya

mekanisme refleksi penerima. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh jumlah dan konsistensi bantuan, tetapi oleh sejauh mana penerima memahami dan menginternalisasi tujuan transformasional program.

Tema 2 — *Rendahnya Literasi Finansial dan Digital menjadi Hambatan Kunci*

Rendahnya literasi finansial dan digital menjadi penghambat signifikan dalam optimalisasi manfaat PKH. Tanpa keterampilan mengelola anggaran, menabung, mengenali prioritas pengeluaran, dan memahami penggunaan sistem transaksi non-tunai, bantuan cenderung habis untuk kebutuhan konsumsi harian, bukan investasi produktif. Studi Liu et al. membuktikan bahwa literasi finansial memiliki korelasi kuat dengan *financial resilience* dan stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama dalam konteks pasca-krisis (Liu et al., 2024)

Digitalisasi bantuan sosial melalui mekanisme cashless transfer mempercepat modernisasi sistem perlindungan sosial, tetapi sekaligus menciptakan *digital divide* bagi kelompok rentan (Purnomo, 2022). Penelitian World Bank (World Bank, 2024) mengenai digitalisasi CCT menyatakan bahwa penerima dengan literasi digital rendah cenderung mengalami ketergantungan pada pendamping atau agen bank untuk mengakses dana atau melakukan transaksi. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian, di mana penerima PKH mengaku hanya "mengikuti arahan pendamping" tanpa memahami proses digital yang dijalani.

Digitalisasi layanan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diharapkan meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan justru menimbulkan hambatan pembelajaran baru bagi penerima manfaat dengan literasi digital dan finansial rendah. Temuan ini sejalan dengan kajian dalam literatur inklusi keuangan dan digital yang menekankan bahwa akses teknologi dan layanan digital tidak otomatis diterjemahkan menjadi inklusi yang substantif. Misalnya, penelitian oleh Peterson K. Ozili (Ozili, 2018) menunjukkan bahwa meskipun keuangan digital (*digital finance*) dapat mendukung inklusi keuangan dan stabilitas finansial, terdapat berbagai tantangan termasuk keterbatasan literasi digital, akses infrastruktur, dan risiko terhadap kelompok miskin yang dapat menghambat realisasi manfaat tersebut. Sejalan dengan itu, kajian oleh World Food Programme (WFP) melalui studi di Asia-Pasifik menyatakan bahwa program transfer tunai digital (*digital cash-based transfers*) berpotensi memperluas akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi dalam praktiknya banyak penerima mengalami kesulitan karena literasi digital rendah, kebutuhan pendampingan, serta kendala infrastruktur dan regulasi (Sarwar et al., n.d.).

Artinya, transformasi digital dalam program bantuan sosial seperti PKH perlu didampingi dengan investasi pada literasi digital dan inklusi finansial, serta pengembangan kapasitas adaptif penerima manfaat bukan sekadar modernisasi mekanisme distribusi. Pendekatan demikian penting agar digitalisasi tidak memperkuat ketergantungan dan kerentanan, tetapi benar-benar mendukung pemberdayaan dan ketahanan jangka panjang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dimaknai oleh sebagian besar penerima sebagai rutinitas administratif dan fungsi konsumtif, bukan sebagai media transformasi pembelajaran atau penguatan kapasitas keluarga. Pola ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa penerima bantuan masih berada dalam tahap *material dependency* dan belum beralih pada *transformative capability* (Sen, 2001). Minimnya literasi finansial dan digital semakin memperkuat pola ketergantungan karena penerima bantuan belum sepenuhnya memahami mekanisme pencairan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana secara produktif.

Temuan ini selaras dengan penelitian Purwaningsih yang menegaskan bahwa literasi finansial di tingkat rumah tangga, terutama ibu sebagai pengelola utama ekonomi domestik, masih berada pada kategori rendah dan membutuhkan intervensi pembelajaran berbasis nonformal yang relevan dan aplikatif. Dalam studi tersebut, penyusunan buku saku literasi finansial berbasis model ADDIE terbukti meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktik finansial penerima pelatihan (Purwaningsih et al., 2025). Demikian pula, dalam studi “*Family Financial Literacy Training in Beji–Depok*” yang mengadaptasi model ADDIE, pelatihan literasi keuangan untuk keluarga berhasil memperbaiki pengetahuan dan perilaku finansial peserta, menunjukkan bahwa intervensi pendidikan nonformal bukan sekadar penyediaan bantuan finansial dan penting untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial (Febriantina et al., 2023). Hal ini menguatkan bahwa penerima bantuan PKH akan mendapatkan dampak lebih besar jika intervensi bantuan dikombinasikan dengan pembelajaran finansial yang kontekstual, sederhana, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tema 3 — P2K2/P3K Menjadi Ajang Administrasi, Bukan Proses Pembelajaran

Secara desain, desain pertemuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk forum pertemuan penerima berkala (P2K2/P3K) memang dimaksudkan sebagai instrumen edukatif diharapkan menjadi wahana pembelajaran sosial, peningkatan kapasitas pengasuhan, literasi keuangan, dan promosi layanan kesehatan. Namun, hasil penelitian di tiga lokus

menunjukkan bahwa dalam praktiknya P2K2/P3K cenderung berfungsi sebagai prosedur administratif belaka: kehadiran dicatat, materi dibacakan sekilas, dan minat terhadap pertemuan meningkat hanya pada saat menjelang pencairan dana. Pola ini menunjukkan bahwa potensi edukatif dari forum tidak termanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan perspektif teori pembelajaran orang dewasa (*adult learning theory*), khususnya Malcolm S. Knowles (Knowles, n.d.) dan penganut andragogi, metode ceramah atau instruksi tunggal seperti itu sebenarnya kurang sesuai untuk orang dewasa. Knowles menekankan bahwa pembelajaran dewasa lebih berhasil jika melibatkan pengalaman peserta, relevansi terhadap kehidupan nyata, refleksi, serta otonomi dan partisipasi aktif peserta dalam proses belajar (Sumiyarno, 2007). Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa ketika prinsip-prinsip andragogi diabaikan, misalnya pembelajaran bersifat top-down, tidak relevan dengan konteks, dan pasif maka hasil perubahan pengetahuan dan perilaku peserta menjadi minimal (Setiawati & Shofwan, 2023).

Dalam konteks PKH, ini berarti bahwa jika P2K2/P3K hanya dijalankan sebagai formalitas administratif tanpa strategi pembelajaran yang partisipatif, kontekstual, dan aplikatif, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi perubahan pemahaman dan praktik sosial-ekonomi rumah tangga, misalnya dalam literasi finansial, pengasuhan, atau kesehatan. Temuan penelitian Anda yang menunjukkan rendahnya literasi finansial dan digital serta dominasi konsumsi pasca-bantuan, alih-alih investasi produktif mendukung kekhawatiran ini. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi transformatif PKH, P2K2/P3K sebaiknya direposisi menjadi ruang pembelajaran dewasa yang partisipatif, misalnya melalui simulasi pengelolaan anggaran rumah tangga, diskusi *peer-to-peer* tentang perencanaan keuangan, pembuatan tujuan keuangan keluarga, dan pembelajaran kontekstual berdasarkan pengalaman nyata peserta. Dengan demikian, implementasi PKH seharusnya tidak hanya berfokus pada mekanisme transfer dan prosedur administratif, tetapi juga pada kualitas proses edukasi agar bantuan sosial dapat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan jangka panjang bagi penerima manfaat, bukan sekadar konsumsi musiman.

Lebih jauh, fenomena pembelajaran informal yang terjadi dalam komunitas penerima PKH menunjukkan adanya pola belajar mandiri yang tidak terstruktur, berbasis pengalaman, dan mengandalkan komunikasi interpersonal antarpenerima bantuan. Pola ini secara filosofis konsisten dengan prinsip andragogi Knowles (Knowles, n.d.) bahwa pembelajaran orang

dewasa terjadi ketika pengalaman hidup dihargai sebagai sumber belajar dan ketika pembelajaran berfokus pada pemecahan masalah, bukan penguasaan teori semata.

Temuan ini juga dapat dibaca melalui perspektif teori pendidikan orang dewasa sebagaimana dijelaskan dalam buku Rosmilawati, Purwaningsih & Tanzil (2024) bahwa pembelajaran bagi orang dewasa akan berhasil apabila bersifat relevan, partisipatif, bersandar pada pengalaman personal, dan memungkinkan refleksi makna terkait pengalaman hidup. Dalam konteks PKH, sesi P2K2 pada dasarnya dirancang sebagai ruang pembelajaran, namun implementasi lapangan menunjukkan karakter yang lebih bersifat informatif-administratif dibandingkan *participatory-learning*. Dengan demikian, program ini belum sepenuhnya menempuh proses pembelajaran transformatif sebagaimana diidealkan dalam kerangka andragogi.

Oleh sebab itu, pembelajaran dalam konteks penerima PKH perlu didesain sebagai proses *learning ecosystem* yang berlapis: informal (*peer-to-peer*), nonformal (pelatihan berbasis komunitas), dan semi-formal (pendampingan terstruktur) dengan prinsip keberlanjutan belajar sejalan dengan kerangka *lifelong learning*.

Tema 4 — *Resiliensi Lokal Terbentuk melalui Strategi Bertahan Informal*

Meskipun dalam temuan sebelumnya muncul kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan, penelitian ini juga mengungkap bahwa resiliensi tetap hadir melalui mekanisme lokal berbasis modal sosial. Informan menunjukkan strategi adaptif seperti praktik gotong royong, sistem pinjam uang antar tetangga, diversifikasi sumber pendapatan melalui pekerjaan informal, serta pengaturan ulang konsumsi rumah tangga sesuai kondisi pendapatan. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa kemampuan bertahan (*coping ability*) telah terbentuk sebelum maupun bersamaan dengan intervensi formal PKH.

Temuan ini selaras dengan laporan World Bank dan UNICEF (2024) yang menjelaskan bahwa rumah tangga di negara berkembang tidak pasif, melainkan mengandalkan mekanisme perlindungan sosial informal sebagai respons pertama terhadap risiko ekonomi. Dengan demikian, resiliensi sebenarnya bukan ketiadaan kemampuan, tetapi kemampuan yang belum diarahkan untuk membangun kapasitas jangka panjang atau menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan (Juma, n.d.).

Menurut perspektif kebijakan, literatur mengenai *adaptive social protection* (Gasior et al., 2024) menekankan bahwa bantuan tunai harus dirancang dengan pendekatan berlapis (*layered approach*), yaitu dipadukan dengan pelatihan keterampilan, intervensi penguatan kapasitas,

edukasi keuangan, serta akses jaringan ekonomi formal. Pendekatan ini memungkinkan transisi resiliensi masyarakat dari sekadar bertahan (*survive/coping*) menuju berkembang dan mandiri (*adaptive and thriving resilience*).

Temuan penelitian pada keempat tema ini memberikan implikasi penting baik pada tataran teori, praktik pendampingan sosial, maupun kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Dari sisi teoretis, hasil penelitian memperkuat teori *capability approach* dari Sen (Sen, 2001) bahwa bantuan finansial tidak otomatis meningkatkan kapasitas apabila tidak dibarengi dengan pembangunan kemampuan, literasi, dan lingkungan pembelajaran yang bermakna. Dalam konteks PKH, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran bantuan tunai perlu dipahami bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai stimulus untuk memperluas fungsi kapasitas penerima manfaat agar mampu melakukan pilihan hidup yang lebih adaptif dan produktif. Penelitian ini juga memperkaya diskusi mengenai *adult learning framework* (Knowles, n.d.), khususnya bahwa pembelajaran orang dewasa akan efektif ketika pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, relevan dengan konteks hidup, dan memanfaatkan pengalaman individu sebagai sumber belajar.

Pada level praktik, penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pendamping PKH perlu digeser dari sekadar *administrative facilitator* menjadi *learning facilitator*. Penyusunan modul pelatihan berbasis literasi finansial dan literasi digital yang aplikatif serta integrasi metode peer-learning menjadi strategi yang relevan untuk konteks penerima bantuan. Selain itu, penggunaan media belajar sederhana seperti *simulation budget tool*, demonstrasi penggunaan e-wallet, dan *community financial planning* dapat meningkatkan daya serap belajar pada kelompok *low-literacy*.

Menilik dari sisi kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa transformasi PKH menuju *adaptive social protection system* (Gasior et al., 2024) perlu disertai strategi penyelarasan antara transformasi digital layanan bantuan dengan kesiapan literasi masyarakat penerima. Dengan demikian, digitalisasi sistem bantuan tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat kemandirian penerima melalui pengurangan ketergantungan pada pendamping.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati dalam menginterpretasikan hasilnya. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada tiga lokus wilayah di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara nasional mengingat variasi implementasi PKH antar daerah cukup signifikan. Kedua, desain

penelitian fenomenologis dengan jumlah partisipan terbatas memungkinkan temuan kaya secara makna, namun tidak representatif secara statistik. Ketiga, pendekatan penelitian ini belum mengeksplorasi interaksi antara variabel struktural seperti jumlah bantuan, frekuensi pencairan, kondisi kependudukan, maupun faktor non-ekonomi lain seperti norma gender atau dinamika kekuasaan dalam rumah tangga. Keempat, studi ini dilakukan dalam rentang waktu relatif singkat sehingga belum menangkap perubahan longitudinal penerima PKH dalam kurun waktu panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) oleh penerima lebih banyak dimaknai sebagai rutinitas konsumsi dibandingkan sebagai mekanisme transformasi menuju kemandirian. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya literasi finansial dan digital, serta pelaksanaan P2K2 yang cenderung bersifat administratif daripada menjadi proses pembelajaran orang dewasa yang reflektif dan partisipatif. Namun demikian, resiliensi keluarga tetap bertumbuh melalui strategi adaptif informal berbasis modal sosial, seperti gotong royong, praktik hutang antarwarga, diversifikasi pendapatan, dan penyesuaian pola konsumsi. Dengan demikian, kapasitas bertahan sesungguhnya telah ada, tetapi belum sepenuhnya diarahkan menjadi kapasitas berkembang (*from coping to thriving*). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh nilai bantuan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan program dalam memfasilitasi pembelajaran informal yang relevan, berkelanjutan, dan kontekstual untuk memperkuat literasi finansial, literasi digital, serta kemandirian keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.

Studi ini memberikan kontribusi pada tiga level. Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan perspektif *adaptive social protection*, *adult learning theory*, dan *capability approach* dalam membaca dinamika bantuan sosial di Indonesia, sehingga memperkaya pemahaman mengenai bagaimana bantuan tunai terhubung dengan proses pembelajaran dan perluasan kapabilitas penerima. Secara metodologis, penggunaan pendekatan fenomenologi interpretatif memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman subjektif penerima PKH, termasuk cara mereka memaknai bantuan, mengelola tekanan ekonomi, dan memobilisasi modal sosial dalam keseharian. Secara praktis, penelitian ini menawarkan dasar bagi perancangan program pendampingan berbasis literasi finansial dan digital yang lebih

kontekstual dan partisipatif, sehingga intervensi tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga menysar penguatan kapasitas kemandirian keluarga.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, studi berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dan menggunakan desain longitudinal guna menangkap dinamika perubahan makna bantuan dan kapabilitas penerima dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian mendatang juga dapat melakukan eksperimen pelatihan literasi digital dan finansial berbasis komunitas, serta mengembangkan model pendampingan adaptif berbasis *microlearning* bagi penerima bantuan sosial di wilayah dengan kerentanan teknologi dan sosial yang tinggi, sehingga efektivitas program dapat dievaluasi secara lebih komprehensif dan berorientasi pada penguatan kemandirian jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2024). *Profil Kemiskinan di Provinsi Banten Maret 2024*. <https://banten.bps.go.id/pressrelease.html>
- Bastagli, F., Hagen-Zanker, J., Harman, L., Barca, V., Sturge, G., & Schmidt, T. (2016). *Cash Transfers: What Does the Evidence Say? A Rigorous Review of Programme Impact and of the Role of Design and Implementation Features*. Overseas Development Institute.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Ed.). SAGE Publications.
- Eatough, V., & Smith, J. A. (2017). Interpretative Phenomenological Analysis. In C. Willig & W. Stainton-Rogers (Eds.), *the SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology* (2nd Ed., Pp. 193–209). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781526405555.n12>
- Febriantina, S., Susita, D., Saparuddin, Sholikhah, Zakaria, A., Fadillah, N., Rahmi, Pratama, A., Sasmi, A. A., Malzara, V. R. B., & Azalia, F. C. (2023). Family Financial Literacy Training in Beji, Depok. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 7(2), 166–178. <https://doi.org/10.21009/jpmm.007.2.01>
- Gasior, K., Wright, G., Barnes, H., & Noble, M. (2024). Adaptive Social Protection in Indonesia: Stress-Testing the Effect of a Natural Disaster on Poverty and Vulnerability. *Social Policy & Administration*, 58(3), 505–520. <https://doi.org/10.1111/spol.12983>
- Gentilini, U. (2022). *Cash Transfers in Pandemic Times: Evidence, Practices, and Implications from the Largest Scale up in History*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/37700>
- Hanna, R. (n.d.). Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia.
- Juma, L. (n.d.). *Spotlight on the Global Social Policy and Social Protection Thematic Fund 2024*.

- Knowles, M. S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: from Pedagogy to Andragogy*. Cambridge Adult Education.
- Liu, T., Fan, M., Li, Y., & Yue, P. (2024). Financial Literacy and Household Financial Resilience. *Finance Research Letters*, 63, 105378. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105378>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Pahleviannur, M. R., Pd, S., Saputra, D. N., Pd, S., Sn, M., Mardianto, D., Sinthania, N. D., Kep, S., Kep, M., Hafrida, L., Pd, S., Si, M., Bano, V. O., Si, S., Pd, M., Susanto, E. E., Ak, M., Amruddin, D., Pt, S., ... Lisy, M. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Purnomo, M. A. (2022). Digitalization of Social Protection Systems Policy in Indonesia as a Step Towards Society 5.0. In *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (Ulicoss 2021)*, Bandar Lampung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.014>
- Purwaningsih, N., Sihaloho, R. B., Amalia, S., Hurriah, L., & Inayah, I. (2025). Developing a Financial Literacy Guidebook for Families Using the Addie Model: a Nonformal Education Approach. *Journal of Urban Development in Education*, 1(1), 28–36. <https://journal.nalatama.org/index.php/jude/article/view/15>
- Sarwar, M. B., Diepeveen, S., & Moreno, D. B. (n.d.). Cash Transfers and Digital Financial Inclusion: Regional Evidence from Asia Pacific with a Focus on Bangladesh, Cambodia, and Nepal.
- Sen, A. (2001). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Setiawati, R. I., & Shofwan, I. (2023). Implementasi Prinsip Pendidikan Orang Dewasa pada Pelatihan Tata Busana di Satuan Pendidikan Non Formal SKB Ungaran. *Lifelong Education Journal*, 3(1), 39–59. <https://doi.org/10.59935/lej.v3i1.180>
- Sulastri, A. S., Salyanty, A., Febrianti, R., Siregar, Y. P., Retnowati, G., Wright, G., & Kapoor, R. (n.d.). *Impact of the Covid-19 Pandemic on Program Keluarga Harapan (PKH) Beneficiaries and Program Implementation*.
- Sumiyarno, S. (2007). Pembelajaran Orang Dewasa Berbasis Andragogi: Tinjauan Teori. *JIV*, 2(1), 49–55. <https://doi.org/10.21009/jiv.0201.7>
- World Bank. (2023). *Cash Transfers in Pandemic Times: Evidence, Policy Lessons, and Future Pathways*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1789-8>
- World Bank. (2024). *Digital Progress and Trends Report 2023*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2049-6>